

**FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERLAKSANANYA EKSEKUSI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Dan
Tugas-Tugas Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam**



OLEH

**MUHAMAD INDRA FANI
NIM : 10421025040**

**PROGRAM S1
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Dalam skripsi ini, penulis memaparkan tentang prosedur pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Pekanbaru tentang harta bersama serta faktor penyebab tidak terlaksananya eksekusi Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pembagian harta bersama dalam putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru setelah terjadinya perceraian antara mantan suami dan mantan istri, selanjutnya dilakukan analisis hukum Islam terhadap fakta permasalahan tersebut.

Disamping itu, permasalahan ini dibahas karena dari berbagai salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pembagian harta bersama yang telah diputuskan dan tidak terlaksana sebagaimana putusan yang telah ditetapkan. Disamping peneliti ingin melihat apakah dalam salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang dikeluarkan menemukan kendala dalam hal pelaksanaannya. Oleh karenanya penulis tertarik dan mengangkat permasalahan ini ke dalam karya ilmiah, guna melihat fakta permasalahan pelaksanaan pembagian harta bersama.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, peneliti menetapkan sendiri jumlah sampel. Oleh Karena itu, peneliti menetapkan 3 salinan putusan dari populasi yang ada. Hal ini merupakan sumber data yang bersifat primer. Adapun yang merupakan data sekunder dalam penelitian ini adalah aparat setempat dan literatur pustaka.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu : observasi, peneliti melakukan pengamatan ke lokasi penelitian guna melihat secara dekat peraktek yang terjadi yang dipergunakan sebagai data penjas terhadap hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara terhadap Hakim, Panitra dan Jurusita dan pihak-pihak lain sebagai data yang diperlukan. Studi kepustakaan, peneliti menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

Setelah dilakukan analisis dengan hukum Islam, maka peneliti menyimpulkan pelaksanaan pembagian harta bersama di dalam wilayah Pengadilan Agama Pekanbaru, dari sisi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan belum tereksekusi harta bersama yang terjadi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Pengadilan Agama sudah berupaya dan berperan aktif dalam menyelesaikan perkara tersebut hanya saja permasalahan tersebut belum menemui titik terangnya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 5

B. Batasan Masalah..... 5

C. Permasalahan..... 5

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 6

E. Metode Penelitian..... 6

F. Sistematika Penelitian 9

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA

PEKANBARU 12

A. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru 12

B. Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia 21

C. Visi dan Misi Peradilan Agama..... 22

D. Tata Tertib Pengadilan Agama..... 22

E. Majelis Pengadilan Agama 23

F. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kota Pekanbaru 34

G. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Pekanbaru 27

BAB	III	TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA.....	32
	A.	Pengertian Harta Bersama	32
	B.	Pembagian Harta Bersama Menurut Islam.....	33
	C.	Pembagian Harta Bersama Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia.....	40
	D.	Pendistribusian Harta Bersama	45
BAB	IV	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA.....	46
	A.	Bentuk Pelaksanaan Eksekusi Tentang Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru	46
	B.	Kendala-Kendala Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Pembagian Harta Bersama.....	53
	C.	Analisis Hukum Islam	55
BAB	V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
	A.	Kesimpulan	66
	B.	Saran-saran	70

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau perjanjian suci (*miitsaaqon gholidhan*) untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, akan ada akibat-akibat yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai.

Akibat hukum perkawinan yang putus tersebut bukan saja karena perceraian. Namun karena kematian salah satu pihak juga memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) kematian, (b) perceraian, (c) atas keputusan Pengadilan².

Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi yang telah melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami istri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami istri tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnyanya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan.

Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Serta Penjelasannya, (Bandung : Citra Umbara, 2007), Cet. Ke I, h. 228

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke IV, h.282

kekayaan keluarga³. Hal ini sebagaimana umumnya, bahwa dalam perkawinan ditemukan adanya dari masing-masing pihak, baik suami atau istri mempunyai harta yang dibawa atau diperoleh sebelum terjadinya akad perkawinan di antara mereka. Harta tersebut dikenal dengan sebutan harta bawaan atau harta gonogini.

Di samping itu, ketika harta yang diperoleh setelah berlangsungnya akad perkawinan, maka harta tersebut dinamakan dengan harta bersama. Meskipun dalam rumah tangga yang bekerja adalah suami, maka harta tersebut merupakan harta bersama dari suami dan isteri, karena dalam hal ini sudah terjalin kerjasama dan pembagian fungsi, dimana seorang isteri berperan sebagai ibu dalam rumah tangga (*ummu warobbatu al-bayt*)⁴. Oleh karena itu, suami maupun istri mempunyai hak dalam menggunakan harta bersama yang telah diperolehnya, selama untuk kepentingan dan kemaslahatan rumah tangganya, setelah melalui persetujuan kedua belah pihak dan atas izin dari suami. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35⁵.

Menurut pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sementara dalam pasal 37 juga disebutkan bila perkawinan

³ J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1999) cet I, h. 5

⁴ Mohd..Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999) cet, II, h. 231-232

⁵ Hilma Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999) cet, IV, h. 155

suami istri tersebut putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan atau hukum yang lain. Jika tidak ada kesepakatan di antara mereka mengenai harta bersama itu, maka hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya⁶.

Sedangkan dalam pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa: “apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian dari perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”⁷.

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah lembaga peradilan yang diatur dan diakui keberadaannya oleh undang-undang dan memiliki kompetensi, baik absolut maupun relatif. Kompetensi absolut Pengadilan Agama Pekanbaru, sebagaimana Pengadilan tingkat pertama lainnya, yang berwenang mengadili sebagian perkara perdata yang timbul dan dianjurkan oleh mereka yang beragama Islam dan warga negara Indonesia. Selain itu, Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu dari pengadilan perdata yang khusus menyelesaikan masalah *ahwal al-syakhsyah*⁸.

Pengadilan Agama Pekanbaru, sebagai Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kota Pekanbaru dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota Pekanbaru. Pada tahun 2008-2009, Pengadilan Agama Pekanbaru menerima perkara perceraian sebanyak 2.635 perkara dan yang

⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), h 189.

⁷ *Ibid.*

⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Nasional : Studi Analisis dan Undang-Undang No.1 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara 1986) h 31

telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dari perkara perceraian tersebut adalah berjumlah 2.269 perkara. Dari perkara tersebut terdapat 769 perkara yang berkenaan dengan masalah cerai thalak dan 1.729 perkara tentang cerai gugat. Kemudian 13 perkara adalah masalah *hadhanah*. Dari beberapa kasus yang diterima dan terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2008-2009, terdapat 34 kasus tentang harta bersama antara suami isteri.

Menurut informasi Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, terdapat 50% kasus yang bermasalah tentang pembagian harta bersama suami isteri. Adapun putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengalami masalah (tidak dieksekusi) sebagai berikut:

1. Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 319/Pdt.G/2009/PA.Pbr, yang mengadili pembagian harta bersama antara Mustafa Kamal Bin H. Miming (penggugat) dan Harviyones Binti Johar (tergugat).
2. Putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 454/Pdt.G/2009/PA.Pbr, yang mengadili pembagian harta bersama antara pasangan Reni Rita Hartati,Sh Binti Halel. Ramli Bst (penggugat) dan Ir.Edwar Rufli,Mt Bin Zainal Rufli (tergugat)
3. Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 448/Pdt.G/2009/PA.Pbr, yang mengadili pembagian harta bersama antara Ina (mantan isteri) dan Yasril (mantan suami).⁹

⁹ Zulfitri, SH (Panmud Hukum), *Wawancara*, Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 11 Maret 2010

Berdasarkan beberapa kasus di atas membuat penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan judul:

“FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERLAKSANANYA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang akan dilaksanakan lebih terarah dan sampai kepada maksud serta tujuan dari penelitian yang akan diharapkan, maka penulis memfokuskan penelitian ini tentang faktor penyebab tidak dieksekusinya putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pembagian harta bersama pada 3 kasus yaitu :

1. Nomor 319/Pdt.G/2009/PA.Pbr
2. Nomor 454/Pdt.G/2009/PA.Pbr
3. Nomor 448/Pdt.G/2009/PA.Pbr

C. Permasalahan

Berdasarkan pembahasan masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan tidak terlaksananya eksekusi putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pembagian harta bersama?

3. Bagaimana analisis Hukum Islam tentang faktor tidak terlaksananya eksekusi putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pembagian harta bersama?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan eksekusi putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pembagian harta bersama.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya eksekusi putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pembagian harta bersama.
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam tentang faktor tidak terlaksananya eksekusi putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pembagian harta bersama.

b. Kegunaan Penelitian

1. Untuk merealisasikan salah satu Tri Darma Peguruan Tinggi yaitu keilmuan dan Penelitian.
2. Menambah wawasan bagi penulis dalam masalah pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama Pekanbaru dan sebagai referensi bagi peneliti yang lain untuk meneliti selanjutnya.
3. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field resech*). Metode tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menjadi wewenangan Pengadilan Agama kelas 1 A Pekanbaru jalan Rawa Indah dalam menyelesaikan dan menetapkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh pihak-pihak berpekara yang beragama Islam.

b. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah hakim dan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah faktor tidak dieksekusi putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pembagian harta bersama.

c. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mantan suami dan mantan istri yang bercerai yang bermasalah dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru dimana tidak mendapat hak serta tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana mestinya. Jumlah Populasi dalam penelitian berjumlah 68 orang dari 34 perkara harta bersama yang putusannya bermasalah. Karena populasinya banyak maka penulis mengambil sampel dalam penelitian ini 10% dari kasus suami dan istri tentang masalah harta bersama yaitu 3 kasus, dengan metode *purfusive sampling* yaitu dimana penulis menetapkan sendiri jumlah sampel.

d. Sumber Data

Dalam penulisan ini data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan skunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu berupa putusan hakim tentang pembagian harta bersama.
2. Data Skunder adalah data yang diperoleh dari hakim, panitra, jurusaita dan teori-terori yang terkait dengan masalah yang penulis teliti.

e. Metode Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian, yaitu lapangan dan pustaka. Maka dengan landasan tersebut pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Observasi, yaitu penulis langsung turun kelokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu dengan menemukan pertanyaan secara lisan mengenai permasalahan yang diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu data-data yang ada di Pengadilan Agama berhubungan dengan perkara yang penulis teliti.
- d. Studi perpustakaan, yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan permasalahan yang sedang penulis teliti.

f. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan masalah yang diteliti, selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan dimengerti, kemudian dibandingkan atau diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan serta terori hukum lainnya.

g. Metode Penulisan

Setelah data-data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, kemudian data tersebut disusun dengan menggunakan metode:

- a. Metode deduktif, adalah, menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti. Kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode induktif, adalah mengambil data-data yang dianggap berhubungan dengan masalah yang diteliti, dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode deskriptif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan ini, penulis menyusun pembahasan penelitian yang akan dilaksanakan ke dalam lima bab penelitian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Permasalahan
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

- A. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru.
- B. Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia
- C. Visi dan Misi Peradilan Agama
- D. Tata Tertib Pengadilan Agama
- E. Majelis Pengadilan Agama
- F. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kota Pekanbaru
- G. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

BAB III : HARTA BERSAMA DALAM ISLAM

- A. Pengertian Harta Bersama
- B. Pembagian Harta Bersama Menurut Islam
- C. Pembagian Harta Bersama Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia
- D. Pendistribusian Harta Bersama

BAB IV : FAKTOR TIDAK DIEKSEKUSI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

- A. Bentuk pelaksanaan eksekusi tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- B. Kendala-kendala Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Pembagian Harta Bersama
- C. Analisis Hukum Islam

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

Ditinjau dari sejarah, keberadaan Peradilan Agama mempunyai rangkaian sejarah yang sangat panjang, dimulai dari zaman pra penjajahan Hindia Belanda sampai pada saat sekarang ini. Berbicara sejarah Peradilan Agama di Pekanbaru, tentu tidak terlepas dari sejarah keseluruhan Peradilan Agama yang ada di Indonesia.

Peradilan Agama telah tumbuh dan melembaga di bumi nusantara (Indonesia) sejak Islam dianut oleh penduduk yang ada di wilayah ini, yakni berabad-abad lamanya sebelum kehadiran penjajah. Tumbuh dan berkembangnya lembaga Peradilan Agama adalah karena kebutuhan dan kesadaran hukum oleh umat Islam.¹

Keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia sebenarnya merupakan institusi yang sudah cukup tua, lebih tua dari Departemen Agama dan bahkan lebih tua dari usia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia sudah ada sejak munculnya kerajaan-kerajaan Islam di bumi nusantara, munculnya bertepatan atau berbarengan dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai, Demak, Mataram, Banten, Cirebon, dan kerajaan-kerajaan lainnya.

¹ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), Cet. Ke II, h. 42

Badan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang mempunyai kekuasaan yang mengadili dan memutuskan perkara untuk melenyapkan gugat menggugat dan untuk menengahi konflik hukum syara' yang dipetik dari al-Qur'an dan Hadits.²

Pada saat jayanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, lembaga Peradilan Agama dikenal dengan istilah *Mahkamah Syari'ah*, setelah bangsa Belanda mendominasi kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum, maka pengaruh hukum Belanda sangat jelas terlihat dalam lembaga Peradilan yang ada, walaupun demikian keberadaan lembaga Peradilan Agama, khususnya agama Islam masih eksis hingga bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya.

Sebelum lembaga Peradilan Agama diresmikan pada tahun 1982, pemerintah Kolonial Belanda telah mengakui keberadaan dan berjalannya Peradilan Agama dikalangan umat Islam, diantaranya :

1. Pada bulan September 1908, ada suatu instruksi dari Hindia Belanda kepada para Bupati yang berbunyi : “Terhadap urusan-urusan agama orang Jawa tidak akan dilakukan gangguan-gangguan, dan kasus banding dapat diajukan kepengadilan banding”.
2. Pada tahun 1820, melalui Stadblad Nomor 22 pasal 13 ditentukan bahwa Bupati wajib memperhatikan soal-soal agama Islam, supaya para pemuka agama dapat melaksanakan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa, seperti soal perkawinan, pembagian pusaka, dan lain sebagainya. Dan

² T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 7

istilah “*Bupati*” dalam ketentuan tersebut di atas, dapat dikonklusikan bahwa Peradilan Agama telah ada di seluruh pulau Jawa.³

3. Pada tahun 1823 dengan Resolusi Gubernur Jendral pada tanggal 3 Juni 1823 Nomor 12 diresmikan Pengadilan Agama di Kota Palembang yang diketuai oleh Pangeran/Penghulu. Sedangkan banding dapat dilakukan kepada Sultan.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa keberadaan lembaga Peradilan Agama bagi umat Islam, meskipun di masa Penjajahan Belanda, namun lembaga Peradilan Agama tetap diberlakukan dan diakui keabsahannya oleh pemerintah Kolonial Belanda.

Untuk wilayah Sumatera Tengah (Riau), Sumatera Barat, Jambi pada tahun 1957 telah dibentuk Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah di luar Jawa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama atau Mahkamah Syari’ah di luar Jawa dan Madura dicantum dalam lembaran Negara tahun 1957 Nomor 99.⁴

Khusus untuk wilayah Sumatera Tengah (Riau), Sumatera Barat, Jambi pada tahun 1957 telah dibentuk Peradilan Agama yang berkedudukan di Padang. Dari pembentukan Mahkamah Syari’ah ini kemudian berkembang lembaga Peradilan Agama dalam wilayah Propinsi Riau, termasuk Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

³ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, h 43

⁴ Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, (Medan : Duta Karya, 1989), h. 1- 2

Keberadaan Pengadilan Agama dalam wilayah Propinsi Riau pada awalnya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Padang. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang tugas Pengadilan Agama, yaitu pada pasal 1 yang mengatur bahwa di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negara harus didirikan Pengadilan Agama yang daerah hukumnya sama dengan Pengadilan Negeri, maka oleh pemuka masyarakat Pekanbaru yang terdiri dari alim ulama dan cerdik pandai dicarilah orang yang dirasa patut dan mampu untuk memimpin Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah tersendiri di Kota Pekanbaru.⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura yang diundang pada tanggal 09 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara Tahun 1957 No. 99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor : 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan yang dibentuk secara bersama yakni Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Pekanbaru, Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau, maka diusulkanlah sebagai Pimpinan

⁵ Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan se-Wilayah Riau*, (Pekanbaru: t.p., 1995), h. 8

Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Pekanbaru KH. Abdul Malik anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi, dan atas usulan tersebut Pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui KH. Mansur, Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Bukittinggi, Bapak KH. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 01 Oktober 1958 secara resmi melantik KH. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.⁶

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan *Meubeler* yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Samratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kontor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga KH. Abdul Malik (Ketua Pertama) meninggal dunia tanggal 01 Januari 1970.

Sepeninggalan almarhum KH. Abdul Malik kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru diganti oleh Drs. H. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa

⁶ SY. Effendi Siregar, dkk, *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru: Tim Penyusun Profile Pengadilan Agama Pekanbaru, 2007), h. 4

Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.⁷

Di tahun-tahun pertama berdirinya, Pengadilan tersebut boleh dikatakan belum ada menerima perkara yang masuk untuk disidangkan. Hal ini disebabkan karena Islam Pekanbaru masih cenderung untuk menyelesaikan perkara kasus mereka seperti perkara perselisihan perkawinan atau thalak ke Kantor Urusan Agama. Selain itu, masyarakat Islam Pekanbaru belum banyak mengenal fungsi, kedudukan dan tugas Pengadilan Agama Pekanbaru. Juga antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri masih berebut wewenang tentang lembaga mana yang berhak mengadili perkara-perkara, seperti perkara waris-mawaris.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 :

“ Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-istri yang bergama Islam dan segala perkara yang menurut Hukum Islam, yang berkenaan dengan masalah nikah, thalak, rujuk, fasakh, mahar dan shadaqah, wasiat, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu serta perkara perceraian dan pengesahan bahwa syarat ta’lik sudah berlaku.⁸

Namun menurut Tarmizi, SH, salah seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, masalah waris mal waris merupakan wewenang Pengadilan

⁷ *Ibid*, h. 5

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), Ed. 2,

Negeri berdasarkan Statblad 1882 Nomor 152 yaitu Undang-undang tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Akibat adanya perbedaan pendapat tersebut maka sering kali Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah sesuai dengan PP No. 45 Tahun 1957 terhambat pelaksanaannya akibat adanya eksekusi dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Hambatan ini baru teratasi setelah lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam. Dengan itu pula Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan dan melaksanakan putusannya sendiri tanpa ada campur tangan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri.⁹

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pemimpin dari Drs. H. Abbas Hasan yang dipindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini nama-nama Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dari awal sampai sekarang.

⁹ Abbas Hasan, *op.cit.*, h. 10

TABEL I
NAMA-NAMA KETUA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
DARI AWAL SAMPAI SEKARANG

No	Nama	Tahun
1	K.H. Abdul Malik	1958 – 1960
2	Drs. H. Abbas Hasan	1960 – 1979
3	Drs. Amir Idris	1979 – 1987
4	Drs. H. Marjohan Syam, SH	1987 – 1994
5	Drs. Abdurrahman Har, SH	1994 – 1998
6	Drs. H. Lumbah Hutabarat, SH	1999 – 2001
7	Drs. H. Zein Ahsan	2001 – 2004
8	Drs. H. Harun S., SH, MH	2004 - 2006
9	Drs. H. Masrum, MH	2006 - 2007
10	Drs. M. Taufiq Hamami, SH	2007 - 2009
11	Drs. H.Firdaus HM.SH.MH	2009-sekarang

Sedangkan alamat Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru sering mengalami perpindahan, adapun urutan-urutan alamat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jalan Rambutan No. 20 (1958 – 1966)
2. Jalan Riau Lama (1966 – 1971)
3. Jalan Samratulangi (1971 – 1973)
4. Jalan Singa (1973 – 1976)
5. Jalan Kartini (1976 – 1985)
6. Jalan Pelanduk No. 21 (1985 – 2007)
7. Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 01 (2007 – sekarang)

Terjadinya perpindahan Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru sampai berulang kali, dikarenakan Pengadilan Agama belum mempunyai gedung sendiri. Akibatnya Pengadilan Agama terpaksa menumpang pada Kantor Kanwil Pertanian Provinsi Riau, Kanwil Depag, dan bahkan pernah menyewa rumah penduduk. Akan tetapi, pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru di pegang oleh Drs. H. Masrum, MH, maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor sendiri di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 01 Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru, yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa, dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di komplek Kanwil Departemen Agama Propinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, MM, yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru ke dalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk jabatan ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Kini sejak tanggal 01 Juli 2004 semua badan peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru, telah menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga peradilan di Indonesia.¹⁰

B. Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Visi

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan Independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat.
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan.
5. Mewujudkan Institusi Peradilan yang Efektif, Efisien, bermartabat dan dihormati.

¹⁰ SY. Effendi Siregar, dkk, *op.cit.*, h. 6

6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

C. Visi dan Misi Peradilan Agama

Visi

Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai di bawah lindungan Allah SWT.

Misi

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam di Indonesia di bidang Kekeluargaan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

D. Tata Tertib Pengadilan Agama

Sebaiknya Pengadilan Agama bertempat di kota pemerintahan, dan hakim dalam mengadili di tempat yang bisa terlihat oleh pengunjung. Diantara tata tertib pengadilan dan hakim adalah :

1. Bertempat tinggal di kota (tempat) pemerintahan, sebab lebih cepat bisa bertindak dan mendekati keadilan.
2. Dalam mengadili, hakim duduk di tempat terbuka yang bisa dilihat oleh terdakwa, penggugat, dan pengunjung, sehingga menghilangkan syakwasangka.

3. Sebaiknya, tidak memutuskan perkara di masjid. Sebab di masjid tidak bisa bebas; seperti tidak bisa bersuara keras, tidak semua perempuan bisa masuk, dan lain sebagainya.¹¹

E. Majelis Pengadilan Agama

Antara orang yang berselisih harus diperlakukan sama dalam 3 (tiga) hal, yaitu : (1) Tempat duduk, (2) kata-kata, (3) perhatian. Tempat duduk, artinya; masing-masing diberi kebebasan menyampaikan argumennya (alasan) dan mengemukakan pendapatnya. Masing-masing harus mendapat perhatian yang sama, artinya alasan-alasannya diperhatikan, dan pandangan hakim ke arah yang sama.¹² Sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah SWT :

: ءل . ئ

Artinya : “Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan”.

(QS. an-Nisaa : 135)¹³

F. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

1. Tugas Pengadilan Agama

Menurut ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memberikan, memutuskan

¹¹ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Cet. ke-3, h. 377

¹² *Ibid*, h. 378

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 144

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Waqaf dan Shadaqah.

Dalam ayat (2) menerangkan : Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Ayat (3) menerangkan : bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf (b) adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.¹⁴

2. Wewenang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik di tingkat pertama, maupun di tingkat banding.¹⁵ Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif

¹⁴ *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Medan: Duta Karya, 1995), Ed. 1, h. 17

¹⁵ Cik Hasan Bisri, MS., *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989), h. 204

pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Kekuasaan relatif ini sangat penting untuk mengetahui ke pengadilan manakah seseorang harus mengajukan perkaranya.

Adapun kekuasaan relatif Pengadilan Agama Pekanbaru meliputi wilayah Kota Pekanbaru-Riau.

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan Absolut adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis tingkat Pengadilan.¹⁶

Mengenai kewenangan atau kekuasaan Pengadilan Agama dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Izin Poligami | (Pasal 4 ayat 1) |
| 2) Izin Kawin bagi yang belum berusia 21 tahun | (Pasal 6 ayat 5) |
| 3) Dispensasi Kawin | (Pasal 7 ayat 1) |
| 4) Pencegahan Perkawinan | (Pasal 17 ayat 1) |
| 5) Penolakan Perkawinan | (Pasal 21 ayat 3) |
| 6) Pembatalan Perkawinan | (Pasal 25) |
| 7) Gugatan kelalaian kewajiban suami atau istri | (Pasal 34 ayat 3) |
| 8) Perceraian karena thalak | (Pasal 39) |

¹⁶ H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 27

- | | |
|--|-------------------|
| 9) Gugatan perceraian | (Pasal 40 ayat 1) |
| 10) Penyelesaian harta bersama | (Pasal 35) |
| 11) Penguasaan anak | (Pasal 41 sub a) |
| 12) Biaya penghidupan istri | (Pasal 41 sub c) |
| 13) Biaya pemeliharaan anak | (Pasal 41 sub c) |
| 14) Kedudukan anak atas dasar tuduhan zina | (Pasal 44 ayat 2) |
| 15) Pencabutan kekuasaan orang tua | (Pasal 49 ayat 1) |
| 16) Penunjukan dan pencabutan kekuasaan wali | (Pasal 53 ayat 2) |
| 17) Tuntutan ganti rugi atas wali | (Pasal 54) |
| 18) Penetapan asal usul anak | (Pasal 55 ayat 2) |
| 19) Pengesahan kawin campur | (Pasal 60 ayat 5) |
| 20) Perkawinan poligami | (Pasal 65 ayat 5) |

Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai salah satu institusi Pengadilan, dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

G. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

Menurut pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, susunan organisasi Badan Peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Sementara pasal 10 ayat (1) Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa unsur Pimpinan Pengadilan Agama itu adalah Ketua yang dibantu oleh seorang Wakil Ketua.

Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1958, disebutkan pula bahwa dalam menjalankan tugasnya, Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa Orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jusrita. Sedangkan pasal 38 menegaskan bahwa pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Jusrita dan Jusrita Pengganti.

Selanjutnya, pasal 43 Undang-Undang yang sama, menggariskan bahwa pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris, sedangkan pasal 44 mengatur bahwa Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan.

Adapun susunan/struktur Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2010, ketika penelitian ini dilakukan, adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| 1. Ketua | : Drs. H. Firdaus HM, SH.MH |
| 2. Wakil Ketua | : Drs. H. M. Nasrul. K, SH.MH |
| 3. Majelis Hakim | : Dra. Hj. Rismaniar HS, MH |
| | Dra. Hj. Mariati |
| | Drs. Lefni MD. MH |
| | Dra. Ilfa Susanti, SH.MH |
| | Drs. Sy. Effendi Siregar, SH.MH |
| | Dra. Hj. Syamsiah Junaid, SH, MH |
| | Drs. Ahmad Anshary M, SH |
| | Dra. Hj. Syamsyah J, SH.MH |
| | Drs. Fachrurrozi, HI |

4. Panitera/Sekretaris : Rasyidi MS, SH
 5. Wakil Panitera : Al-Masri, SH
 6. Wakil Sekretaris : Henny Musyarrofah, SH
 7. Panmud Permohonan : Hj. Marsyidah, SH
 8. Panmud Gugatan : Drs. H. Amri
 9. Panmud Hukum : Zulfitri, SH
 10. Kasubag Keuangan : Fadlul Akyar, SH
 11. Kasubag Kepegawaian : Kaharudin, SH
 12. Kasubag Umum : M. Jamil, M.Ag
 13. Panitera Pengganti : Akhyar
- Wan Wahid, BA
- Ernawati, SH
- Nurhakim, SH
- Fahlinawati, SH
- Zahniar, SH
- Zulfahmi, S.Ag
- Hidayati, S.Ag
- Yulia Afriyanti, S.Ag
- M. Yunan, S.Ag
- Asmidar, S.Ag
- Zulhery Artha, S.Ag
- Umi Salmah, SH

14. Jurusita : Aguslim
Syukri
15. Jurusita Pengganti :Hidayah
Komaria
Wawan Suwandi
Rini Artati
Adek Hendra
Khairul Anwar
Habibunazar

BAB III

HARTA BERSAMA DALAM ISLAM

DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

A. Pengertian Harta Bersama

Dari segi bahasa pengertian harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan.¹ sedangkan yang dimaksud harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.²

Dalam harta benda, termasuk di dalamnya apa yang dimaksud harta benda perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suami isteri dan barang-barang hadiah.³

Pencariaan bersama suami isteri atau yang disebut harta bersama atau *gono gini* ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Hal ini termuat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sebenarnya harta bersama ini berasal dari hukum adat yang pada

199 ¹. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 1989), cet.2, h

200 ². Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h.

IV, h. 156 ³. Hilma Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Aditya Bakti, 1999), cet.

pokoknya sama di seluruh wilayah Indonesia, yaitu adanya prinsip bahwa masing-masing suami dan isteri, masih berhak menguasai harta bendanya sendiri sebagai halnya sebelum mereka menjadi suami isteri. Mengenai harta bersama dapat dimasukkan dalam istilah *syirkah* (perkongsian).

B. Pembagian Harta Bersama Menurut Islam

Harta bersama atau *gono-gini* yaitu harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami isteri selama terikat oleh tali perkawinan, atau harta yang dihasilkan dari *perkongsian* suami isteri.

Untuk mengetahui hukum perkongsian ditinjau dari sudut Hukum Islam, maka perlu membahas perkongsian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut pendapat para Imam madzhab. Dalam kitab-kitab fiqh, perkongsian itu disebut sebagai *syirkah* atau *syarikah* yang berasal dari bahasa Arab. Para ulama berbeda pendapat dalam membagi macam-macam *syirkah*. Adapun macam-macam *syirkah* yaitu :

1. *Syirkah Milk* ialah perkongsian antar dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu aqad atau perjanjian.
2. *Syirkah Uquud* yaitu beberapa orang mengadakan kontrak bersama untuk mendapat sejumlah uang. *Syirkah* ini berjumlah 6 (enam) macam yaitu :
 - a. *Syirkah Mufawadlah bil Amwal* (perkongsian antara dua orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan).
 - b. *Syirkah 'Inan bil Amwal* ialah perkongsian antara dua orang atau lebih

tentang suatu macam perniagaan, atau segala macam perniagaan.

- c. *Syirkatul 'Abdan Mufawadlah* yaitu perkongsian yang bermodal tenaga.
- d. *Syirkatul 'Abdan 'Inan* ialah kalau perkongsian tenaga tadi disyaratkan perbezaan tenaga kerja dan perbezaan tentang upah.
- e. *Syirkatul Wujuh Mufawadlah* yaitu perkongsian yang bermodalkan kepercayaan saja.
- f. *Syirkatul Wujuh 'Inan* yaitu perkongsian kepercayaan tanpa syarat.

Syirkah 'Inan disepakati oleh ulama tentang bolehnya, sedangkan *syirkah mufawadlah* hukumnya boleh menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Tetapi menurut madzhab Syafi'i tidak boleh. Abu Hanifah mensyaratkan sama banyak modal antara masing-masing peserta perkongsian. Untuk *Syirkah Abdan* boleh menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, dan tidak boleh menurut madzhab Syafi'i. Bedanya Imam Malik mensyaratkan pekerjaan yang mereka kerjakan harus sejenis dan setempat. *Syirkah wujuh* boleh menurut Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah dan menurut Imam Maliki dan Syafi'i tidak boleh.

Alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan *syirkah mufawadlah* karena nama perkongsian itu percampuran modal. Imam Malik berpendapat, bahwa dalam *syirkah mufawadlah* masing-masing kongsi telah menjualkan sebagian dari hartanya dan juga mewakilkan kepada kongsinya yang lain. Tetapi Imam

Syafi'i menolak pendapat ini, bahwa perkongsian bukan jual beli dan bukan pula memberikan kuasa.

Alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan *syirkah abdan* karena perkongsian hanya berlaku pada harta, bukan pada tenaga. Alasan Imam Malik membolehkan perkongsian tenaga karena orang yang berperang sabil juga berkongsi tentang ghanimah.

Dari macam-macam *syirkah* serta adanya perbedaan pendapat dari para Imam madzhab dan melihat praktek *gono-gini* dalam masyarakat Indonesia dapat disimpulkan bahwa harta *gono-gini* termasuk dalam *syirkah abdan / mufawadlah*.

Praktek *gono-gini* dikatakan *syirkah abdan* karena kenyataan bahwa sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka, kalau keadaan memungkinkan juga untuk meninggalkan kepada anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia. Suami isteri di Indonesia sama-sama bekerja mencari nafkah hidup. Hanya saja karena fisik isteri berbeda dengan fisik suami maka dalam pembagian pekerjaan disesuaikan dengan keadaan fisik mereka. Selanjutnya dikatakan *syirkah mufawadah* karena memang perkongsian suami isteri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan mereka termasuk

harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau pemberian khusus untuk salah seorang diantara mereka berdua.⁴

Pada perkongsian *gono-gini* tidak ada penipuan, meskipun barangkali pada perkongsian tenaga dan *syirkah mufawadlah* terdapat kemungkinan terjadi penipuan. Sebab perkongsian antara suami isteri, jauh berbeda sifatnya dengan perkongsian lain. Waktu dilakukan ijab qobul akad nikah, perkawinan itu dimaksudkan untuk selamanya. Perkongsian suami isteri tidak hanya mengenai kebendaan tetapi juga meliputi jiwa dan keturunan.⁵

Dalam kitab Bidayatul Mujahtid, menerangkan bahwa alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan ialah karena pengertian *syirkah* menghendaki percampuran, dan percampuran itu hanya dapat terjadi pada modal, sedang pada perkongsian tenaga dan kepercayaan tidak ada modal. Dalam hal ini hanya madzhab syafi'i saja yang tidak membolehkan.

Secara logika perkongsian itu boleh karena merupakan jalan untuk mendapatkan karunia Allah, seperti dalam firman Allah surat Al-Jum'ah ayat 10.

Adapun bunyi ayat tersebut yaitu :



⁴. Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), Cet. 11, h. 78-79

⁵. *Ibid.*, h. 102-103



Artinya :

"Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebarlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan perbanyaklah kamu mengingat Allah supaya kamu beruntung"

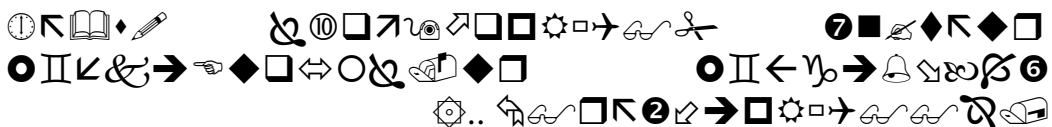
Mengingat perkongsian itu banyak macamnya terjadilah selisih pendapat tentang kebolehan. Perkongsian yang menurut ulama tidak diperbolehkan yaitu yang mengandung penipuan

Dalam kaitannya dengan harta kekayaan disyari'atkan peraturan mengenai muamalat. Karena harta bersama atau *gono-gini* hanya dikenal dalam masyarakat yang adatnya mengenal percampuran harta kekayaan maka untuk menggali hukum mengenai harta bersama digunakan qaidah kulliyah yang berbunyi :

محكمه

"adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum"⁶

Dasar hukum dari qaidah di atas yaitu firman Allah surat al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :



⁶ . Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), Cet. 1, h. 88

Artinya :

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”

Dalam ayat itu Allah menyerahkan kepada *urf* penentuan jumlah sandang pangan yang wajib diberikan oleh ayah kepada isteri yang mempunyai anaknya.

Qaidah Al-‘Adatu Mukhakkamah dapat digunakan dengan syarat-syarat tertentu.

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
4. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan.
5. Tidak bertentangan dengan nash.⁷

Hukum Qur’an tidak ada memerintahkan dan tidak pula melarang harta bersama itu dipisahkan atau dipersatukan. Jadi, dalam hal ini hukum Qur’an memberi kesempatan kepada Masyarakat manusia itu sendiri untuk mengaturnya. Apakah peraturan itu akan berlaku untuk seluruh masyarakat atau hanya sebagai perjanjian saja antara dua orang bakal suami isteri sebelum diadakan perkawinan.

⁷ Hasbi Ash. Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta :Bulan Bintang, 1975), cet. 1, h.477

Tentu saja isi dan maksud peraturan atau perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Qur'an dan Hadits.⁸

Masalah harta bersama ini merupakan masalah Ijtihadiyah karena belum ada pada saat madzhab-madzhab terbentuk. Berbagai sikap dalam menghadapi tantangan ini telah dilontarkan. Satu pihak berpegang pada tradisi dan penafsiran ulama mujtahid terdahulu, sedang pihak lain berpegang pada penafsiran lama yang tidak cukup untuk menghadapi perubahan sosial yang ada. Sehingga masalah harta bersama ini perlu dibahas dalam KHI dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 agar umat Islam di Indonesia mempunyai pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi, sehingga terjadi keseragaman dalam memutuskan perkara di Pengadilan.

Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan maupun fatwa tentang harta bersama mengutip langsung ketentuan hukum yang ada dalam Al-Qur'an karena tidak dikenal dalam referensi syafi'iyah. Lebih jauh lagi dalam menetapkan porsi harta bersama untuk suami isteri digunakan kebiasaan yang berlaku setempat, sehingga terdapat penetapan yang membagi dua harta bersama di samping terdapat pula penetapan yang membagi dengan perbandingan dua banding satu. Selain itu di Amuntai harta bersama dibagi sesuai dengan fungsi harta itu untuk suami atau untuk isteri.

C. Pembagian Harta Bersama Menurut Perundang-undangan di Indonesia

⁸. Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum Sebuah Studi Perbandingan*, (Jakarta : Bulan Bintang), Cet 11. h 113

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 mengatakan bahwa :

”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹

Dalam pasal tersebut tersimpul adanya asas, bahwa antara suami isteri terdapat ikatan yang erat sekali, yang meliputi tidak hanya ikatan lahir, ikatan yang nampak dari luar atau ikatan terhadap / atas dasar benda tertentu yang mempunyai wujud, tetapi meliputi ikatan jiwa, batin atau ikatan rohani. Jadi menurut asasnya suami isteri bersatu, baik dalam segi materiil maupun dalam segi spiritual.¹⁰

Mengenai Harta Benda dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, di dalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok

⁹. *UUP No. 1 Tahun 1974*

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), Cet.1,

harta. Hal ini berlainan sekali dengan sistem yang dianut B.W yaitu bahwa dalam satu keluarga pada dasarnya hanya ada satu kelompok harta saja yaitu harta persatuan suami isteri. Menurut UU No. 1 / 1974 kelompok harta yang mungkin terbentuk adalah :

a. Harta bersama

Menurut pasal 35 UU No. 1 tahun 1974, harta bersama suami isteri, hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat di bawa masuk ke dalam perkawinan terletak di luar harta bersama.¹¹

Ketentuan tersebut di atas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga boleh kita simpulkan, bahwa termasuk harta bersama adalah :

- 1) Hasil dan pendapatan suami.
- 2) Hasil dan pendapatan isteri.
- 3) Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya diperoleh sepanjang perkawinan.

¹¹ *Ibid.*, h. 188 - 189

Dengan demikian suatu perkawinan, (paling tidak bagi mereka yang tunduk pada Hukum Adat) yang dilangsungkan sesudah berlakunya UUP tidak mungkin mulai dengan suatu harta bersama dengan saldo yang negatif, paling-paling, kalau suami isteri tidak membawa apa-apa dalam perkawinannya, maka harta bersama mulai dengan harta yang berjumlah nihil.¹²

b. Harta pribadi

Harta yang sudah dimiliki suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan tidak masuk ke dalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi suami isteri, menurut pasal 35 ayat 2 UUP terdiri dari :

- 1) Harta bawaan suami isteri yang bersangkutan.
- 2) Harta yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan.

Apa yang dimaksud dengan "harta bawaan", dalam undang-undang maupun dalam penjelasan atas UU RI nomor 1/1974, tentang perkawinan", tidak ada penjelasan lebih lanjut, tetapi mengingat, bahwa apa yang diperoleh sepanjang perkawinan masuk dalam kelompok harta bersama, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud di sini adalah harta yang dibawa oleh suami isteri. Jadi yang sudah ada pada suami dan atau isteri ke dalam perkawinan.

Adanya pemisahan secara otomatis (demi hukum) antara harta pribadi dengan harta bersama, tanpa disertai dengan kewajiban untuk mengadakan

^{12.} *Ibid.*, h. 192

pencatatan pada saat perkawinan akan dilangsungkan (atau sebelumnya) dapat menimbulkan banyak masalah di kemudian hari dalam segi asal usul harta atau harta-harta tertentu pada waktu pembagian dan pemecahan baik karena perceraian maupun kematian (perceraian). Adalah sangat menguntungkan, kalau di kemudian hari dalam peraturan pelaksanaan diadakan ketentuan yang mewajibkan adanya pencatatan harta bawaan masing-masing suami isteri.

Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal 35 ayat 2, tetapi kalau kita mengingat pada ketentuan pasal 35 ayat 1, maka ketentuan mengenai harta pribadi hibahan dan warisan, kiranya hanyalah meliputi hibahan atau warisan suami / isteri yang diperoleh sepanjang perkawinan saja.¹³

Pasal 35 ayat 2 mengandung suatu asas yang berlainan dengan asas yang dianut dalam B.W, yang menyebutkan bahwa yang suami dan atau isteri peroleh sepanjang perkawinan dengan Cuma-Cuma baik hibahan atau warisan masuk ke dalam harta persatuan kecuali ada perjanjian lain.

Pasal lain dalam UU No. 1 tahun 1974 yang mengatur harta bersama yaitu pasal 36 dan 37 yang berbunyi :

Pasal 36

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak

¹³ *Ibid.*, h. 193 - 194

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai hukum perkawinan banyak terjadi duplikasi dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta kekayaan dalam perkawinan.

Menurut pasal 85 adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Tetapi dalam pasal 86 ditegaskan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

Dalam harta bersama, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 35 UU No. 1 tahun 1974. Mengenai harta bersama lebih lanjut diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97.

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

D. Pendistribusian Harta Bersama

Kajian terhadap harta ini bila dihubungkan dengan masyarakat hukum adat di Indonesia, maka dapat pula di bagi sesuai menurut aspek tinjauannya, yaitu :

1. Ditinjau dari segi wujud harta, maka harta dapat dibagi kepada dua, tanah dan bukan tanah. Tanah disini mencakup segala sesuatu yang tumbuh diatasnya, yang tersimpan didalamnya, dan segala sesuatu yang berada di atasnya, yang tersimpan didalamnya, dan segala sesuatu yang berada di atasnya. Sedangkan yang bukan tanah dirincikan pula pada benda yang berhak dan benda tetap.¹⁴ Benda bergerak minsalnya, kendraan, ternak, dan yang menyangkut dengan gelar kebesaran. Adapun benda yang tidak bergerak, minsalnya rumah, gedung, dan sebagainya. Harta benda berupa tanah adalah sesuatu hal yang vital dalam kehidupan seseorang dan menempati kedudukan utama dari harta yang lain. Ia juga dipandang sebagai salah satu kreteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Ditinjau dari segi bentuknya, harta terbagi pula kepada tanah hutan, tanah pertanian dan tanah ladang. Tanah hutan adalah yang belum diolah dan masih merupakan hutan liar. Tanah pertanian adalah tanah yang berawarawa yang diolah secara terus-menerus untuk tanaman pokok, minsal nya padi, jagung, dan sebagainya. Adapun tanah ladang adalah tanah kering yang

¹⁴ Amir Syaripuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islasm dalam Lingkungan Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1984) h. 212

diolah untuk lahan pertanian, misalnya untuk tanaman palawija, rembulan dan sebagainya.

3. Ditinjau dari segi asalnya, yaitu bagaimana tata cara harta atau tanah itu berada di tangan seseorang, maka harta itu dapat pula dibagi kepada dua macam, yaitu harta yang diperoleh dari warisan dan dari hasil usaha sendiri. Harta warisan adalah harta seseorang yang telah meninggal dunia dan wafat pada tahun diwariskan kepada ahli warisnya. Ahli waris dapat memanfaatkan harta tersebut tanpa terikat lagi dengan hak orang lain didalamnya. Adapun harta yang diperoleh hasil usaha sendiri, yaitu segala hasil pencarian seseorang, baik dengan jalan tebas tebang, sebagai pedagang, sebagai pegawai negeri, petani, peternak, dan sebagainya. Termasuk juga dalam kelompok ini harta yang diperoleh melalui hibah, wasiat, dan seumpamanya.
4. Ditinjau dari hak penggunaannya, harta dapat pula dibedakan kepada hak ulayat (pertuanan) dan hak perorangan. Hak ulayat adalah tanah hutan yang dikuasai oleh penghulu (kepala suku) dan belum di olah sebagai tanah pertanian. Tanah itu dapat digarap, baik secara perorangan atau secara berkelompok dengan persyaratan tertentu. Adapun hak perorangan adalah tanah ulayat yang telah diusahakan oleh seseorang yang dijadikan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Jadi bila tanah ulayat tersebut telah digarap oleh seseorang, maka stastusnya berubah menjadi tanah perorangan.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, h. 219-221

BAB IV
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TENTANG
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

A. Bentuk Pelaksanaan Eksekusi Tentang Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Pengadilan Agama (PA) adalah lembaga yudikatif yang secara teori bersifat “independen” yang berfungsi untuk mengadili berbagai perkara yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga yudikatif yang berfungsi mengadili setiap perkara hukum di lingkungan privat khususnya kasus-kasus yang lahir dalam rumah tangga seperti masalah-masalah perceraian, harta gono gini, waris dan sebagainya.

Jika dilihat secara hukum, seorang beragama Islam yang berperkara dapat mencari jalan penyelesaian akhir dari sengketa perdata di Pengadilan Agama (PA), seperti masalah harta bersama setelah perceraian. Akan tetapi pengadilan membuka peluang kepada mantan suami dan istri untuk menyelesaikan perkara harta bersama setelah perceraian kepada kedua belah pihak dan ketika mantan Suami dan mantan istri terjadi konflik dalam penyelesaian yang dilakukan secara musyawarah tidak terdapat kesepakatan dalam penyelesaiannya, maka pembagian harta bersama dapat meminta bantuan kepada pengadilan untuk mencari jalan penyelesaiannya.

Dalam pembahasan bab ini penulis akan membahas tentang apa yang penulis teliti terhadap masalah pelaksanaan pembagian harta bersama setelah terjadinya putusan yang sah menurut hukum di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dari data penulis temui di lapangan (Pengadilan Agama Pekanbaru) terdapat 34 perkara yang mana pelaksanaannya tidak dijalani dengan semestinya yaitu tidak tereksekusinya harta bersama antara suami dan istri setelah perceraian. Dalam hal ini penulis coba menyajikan 3 kasus yang mana perkara putusannya bermasalah

Setelah terjadi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pembagian harta bersama maka kedua belah pihak untuk melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Dalam hal ini tidak terlaksananya putusan Pengadilan Agama Pekanbaru maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan kepada hakim Pengadilan Agama untuk dieksekusi.

Sebelum penulis memulai memaparkan tentang eksekusi harta bersama, perlu kiranya sedikit penulis singgung tentang definisi istilah eksekusi sebagai istilah yang baku, untuk menghindari pemaknaan istilah yang berlebihan.

Eksekusi berasal dari kata “*executie*”¹, yang artinya melaksanakan putusan hakim (ten uitvoer legging van vonnissen). Di mana maksud eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum,

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 1989), cet.2, h

guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk menjelaskan eksekusi harta bersama, perlu diketahui terlebih dahulu proses yuridis dan administrasi melekatnya titel eksekusi pada harta bersama (HB), yaitu melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Peringatan (*aanmaning*)

Peringatan atau teguran merupakan tahap awal proses eksekusi. Proses peringatan merupakan prasyarat yang bersifat formil pada segala bentuk eksekusi, baik pada eksekusi riil maupun pembayaran sejumlah uang.

Apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pihak tergugat tidak mau melaksanakan apa yang dihukumkan kepadanya secara sukarela, terbuka hak penggugat untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Adanya pengajuan permohonan eksekusi, merupakan dasar hukum bagi Ketua Pengadilan untuk melakukan tindakan peringatan dalam persidangan insidentil :

1. Dengan jalan memanggil pihak tergugat untuk hadir pada tanggal yang ditentukan guna diperingatkan agar menjalankan pelunasan pembayaran yang dihukumkan kepadanya; dan
2. Pada persidangan peringatan, Ketua Pengadilan Negeri memberi batas waktu pemenuhan putusan, yang disebut masa peringatan, dan masa peringatan tidak

boleh lebih dari delapan hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 196 HIR atau pasal 207 RBG.

Apabila pihak tergugat tidak hadir memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang sah, atau setelah masa peringatan dilampaui tetap tidak mau memenuhi pembayaran yang dihukumkan kepadanya, sejak saat itu Ketua Pengadilan secara *exofficio* mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau jurusita untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat, sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam pasal 197 HIR atau pasal 208 RBG.

2. Sita Eksekusi (*executoriale beslag*)

Sita eksekusi atau *executoriale beslag* merupakan tahap lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi melaksanakan pembagian harta bersama. Tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi diatur dalam pasal 197 HIR atau pasal 208 RBG.

Sita eksekusi adalah penyitaan harta kekayaan yang berada pada pihak yang tidak mau melaksanakan putusan. Sita eksekusi dimaksudkan sebagai penyerahan harta yang telah dibagi yang mesti dilaksanakan kepada pihak penggugat. Cara untuk melaksanakan pembagian tersebut, dengan cara menjual lelang harta kekayaan tergugat yang telah disita. Kemudian, sita eksekusi itu dilakukan berdasarkan surat perintah yang menyusul peringatan, baru merupakan penahapan proses sita eksekusi atas harta kekayaan tergugat. Penahapan proses

sita eksekusi harus lagi disusul dengan penahapan proses surat perintah penjualan lelang, dan disusul penjualan lelang oleh kantor lelang.

3. Mekanisme Sita Eksekusi

Untuk mengetahui tata cara sita eksekusi perlu dilihat ketentuan Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 199 HIR atau Pasal 208, Pasal 209, dan Pasal 210 RBG. Secara garis besar adalah :

1. Berdasarkan surat perintah ketua pengadilan
2. Dilaksanakan oleh panitera dan Juru sita
3. Pelaksanaan dihadiri dua orang saksi
4. Sita eksekusi dilakukan ditempat
5. Pembuatan berita acara sita eksekusi

Materi Pasal 33 Undang-Undang PK No. 14 tahun 1970 (Ketentuan ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman) menyebutkan :

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan atau juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
2. Dalam pelaksanaan putusan Pengadilan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara.

Berdasarkan kenyataan dalam praktek, bahwa tata cara pelaksanaan eksekusi putusan Hakim/Pengadilan yang telah B.H.T, pada mulanya diawali dengan acara sebagai berikut :

Apabila ada permohonan pelaksanaan putusan dari pihak yang telah dimenangkan dalam perkara perdata dan oleh pihak tersebut telah membayar uang panjar (*voorschot*) biaya permohonan eksekusi serta biaya lamanya yang diharuskan menurut peraturan dan telah dilakukan pembukuan dan pencatatan dalam daftar yang bersangkutan, maka oleh pihak Pengadilan di perintahkan untuk memanggil pihak lawan yang dikalahkan dan dihukum untuk ditegor supaya melaksanakan putusan yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Ketua, dan dasar perintah pemanggilan tersebut dituangkan dalam suatu surat “Penetapan”.

Pada hari yang telah ditentukan, pihak yang dipanggil itu jika datang kemudian ditegur oleh Ketua Pengadilan supaya melaksanakan putusan yang bersangkutan dalam waktu yang ditentukan oleh Ketua, selambat-lambatnya delapan hari, tentang penegoran (*aanmaning*) mana diwajibkan panitera/juru sita pelaksanaan pembuat berita acara/pencatatan seperlunya tentang hasil *aanmaning* tersebut.

Apabila terhadap teguran itu tidak diindahkan dan atau kalau pihak yang kalah (dipanggil) tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil sepatutnya, maka Ketua Pengadilan karena jabatannya akan mengeluarkan surat perintah untuk menyita barang-barang bergerak (tidak tetap) dan kalau barang-barang itu tidak ada, atau tdk mencukupi, baru dapat dilakukan penyitaan barang-barang tidak bergerak dan yang kalah,

sehingga kiranya cukup untuk membayar jumlah yang disebutkan dalam keputusan itu dan biaya-biaya eksekusi (menjalankan keputusan).

Bahwa, keluarnya surat perintah untuk menyita barang-barang dan yang kalah tersebut, biasanya harus diawali pula dengan adanya permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon eksekusi (pihak yang menang), baik itu dilakukan sendiri maupun melalui kuasanya. Hal ini dikandung maksud Pengadilan dapat mengetahui apakah dalam batas waktu yang telah ditetapkan tersebut pihak yang kalah sudah memenuhi atau mematuhi atau memenuhi isi putusan.

Jika dalam surat penetapan tentang penjualan umum eksekutorial (lelang) sebagai pelaksanaan ditunjuk suatu Kantor Lelang Negara, maka hendaknya dalam surat penetapan (*beschikking*) tersebut mencantumkan pula ketentuan :

“Bahwa hasil bersih dari pelelangan tersebut harus disetorkan (diserahkan) kepada Panitera Pengadilan Agama ...”

4. Penjualan Lelang (*executoriale verkoop*)

Kelanjutan sita eksekusi adalah penjualan lelang. Hal itu ditegaskan pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 216 ayat (1) RBG yang berbunyi :

“penjualan barang yang disita dilakukan dengan bantuan kantor lelang, atau menurut keadaan yang akan dipertimbangkan Ketua, oleh orang yang melakukan penyitaan itu atau orang lain yang cakap dan dapat melakukan penyitaan itu atau orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, yang ditunjuk oleh Ketua untuk itu dan berdiam di tempat di mana penjualan itu harus dilakukan atau di dekat tempat itu”.

Jadi setelah sita eksekusi dilaksanakan, undang-undang memerintahkan penjualan barang sitaan. Cara penjualannya dengan perantara kantor lelang, dan penjualannya disebut penjualan lelang.

Dengan demikian, berdasarkan pasal 200 ayat (1) HIR, dalam pelaksanaan lelang, Ketua Pengadilan wajib meminta intervensi kantor lelang, dalam bentuk menjalankan penjualan barang sitaan dimaksud.

Terhadap prosedur eksekusi jaminan atas hak tanggungan (H.T) berdasarkan Peraturan Lelang (LN 1908-215) *jo.* Pasal 200 HIR, yaitu sebagai berikut :

1. Penjualan di muka umum
2. Dilakukan dengan perantara atau bantuan kantor lelang
3. Bentuk penawaran dilakukan secara tertulis

B. Kendala-kendala Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama

Pekanbaru Tentang Harta Bersama

Dalam hal melakukan suatu tuntutan hak kepada pihak lain, jika melalui pengadilan seorang penggugat tidak akan terlepas dari apa yang disebut dengan eksekusi ini merupakan tujuan akhir dari para pihak yang bersengketa di pengadilan.

Dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia pasti akan ditemui kendala-kendala di dalam pelaksanaannya, kendala sama halnya dengan hambatan dalam sebuah aktivitas. Kendala bagaikan riaknya gelombang dalam

mengarungi samudra. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah mencari solusi dari kendala yang dihadapi. Diharapkan di masa mendatang kendala tersebut tidak ditemukan lagi.

Dalam pelaksanaan keputusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pembagian harta bersama setelah perceraian ditemukan beberapa kendala, sehingga kendala tersebut mengakibatkan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama mengalami hambatan.

Adapun kendala-kendala yang ditemukan di lapangan tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pembagian harta bersama adalah sebagai berikut :

1) Bercampurnya Dengan Harta Orang Lain

Masalah yang sering bermasalah ketika harta yang mau di eksekusi dilapangan adalah bahwa banyaknya harta bersama antara mantan suami dan mantan istri tersebut disebabkan karena seperti minsalnya kasus rumah dimana ketika di survey bahwa rumah tersebut berada di tanah orang tua tergugat. Jadi tentu saja membuat pengadilan susah untuk mengeksekusi dan terpaksa rumah tersebut dirobohkan.

2) Adanya Pihak Ketiga.

Masalah lain yang sangat serius dalam maslah eksekusi yaitu ada harta yang di eksekusi berada di dalam pihak ketiga. Yaitu barang yang hendak di eksekusi tersebut tersebut masih dalam tahap pembayaran dan masih dalam

pengawasan Bank, sehingga harta tersebut terkendala untuk di eksekusi dan menunggu kesepakatan kedua belah pihak mencari solusi terhadap masalah tersebut

3) Ketiadaan Kesepakatan Dalam Lelang.

Seperti pada kasus di atas dimana dalam permasalahan tersebut belum di temui kesepakatan tentang harga barang yang dimaksud, sehingga harta tersebut belum bisa dieksekusi. Hal ini menjadi kendala-kendala yang terjadi dilapangan yang di alami Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menjadi eksekusi terhadap kasus-kasus yang terjadi.

C. Analisis Hukum Islam

Islam adalah agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan dalam hubungan dengan manusia dan pencipta (mengatur masalah aqidah dan ibadah), dengan dirinya sendiri (mengatur masalah makan dan minum, berpakaian dan ahlak (mengatur masalah mu'amalah dan 'uqabat atau sanksi) ².

Islam itu mengatur terhadap seluruh aspek kehidupan, baik itu yang menatur dalam tataran makhluk dengan khalik (berkaitan masalah aqidah dan ibadah), dengan diri sendiri (yaitu meliputi makan, dan minum, berpakaian dan akhlak) maupun dengan sesama manusia interaksi sesamanya. Oleh karena itu Islam merupakan sebuah ideologi yang memiliki sekumpulan aturan yang

² Imam Taqiyudin, *Sistem Peraturan Hidup Dalam Isla Izzah*, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah,2001), h.181

mengatur interaksi antara sesama pemeluknya, di samping sebagai sebuah agama yang mengatur permasalahan ritual antara hamba dan pencipta. Kemudian islam mengatur permasalahan interaksi antara manusia dengan sesama, diantaranya permasalahan dalam lingkup keluarga.

Dalam Islam permasalahan keluarga dibahas khusus oleh ulama-ulama Fiqih terdahulu dalam pembahasan khusus pada bab *munakahat*. Dalam bab ini mengatur permasalahan berhubungan dengan perkara nikah, perceraian (thalaq), hak asuh anak (hadhanah), dan lain sebagainya. Sementara di Negara Indonesia urusan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974³. Oleh karena itu, perkawinan dan perceraian, diakui oleh Undang-Undang. Akan tetapi, ketika perkawinan dan perceraian tidak diakui oleh Undang-undang, maka perkawinan atau perceraian tersebut dianggap tidak sah.

Selanjutnya, disamping permasalahan perkawinan diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, permasalahan perkawinan ini juga diatur berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jadi, jika ditemukan permasalahan pun dalam lingkup keluarga, maka penyelesaiannya dilakukan didepan hakim di Pengadilan berdasarkan KHI tersebut, termasuk permasalahan tentang harta bersama.

Berkaitan dengan kasus perceraian dalam masalah harta bersama yang menjadi permasalahan tersebut dianalisis sesuai hukum Islam. Adapun fakta

³ Abd, Thalib, *Hukum Keluarga dan perikatan*, (Pekanbaru: UIR Press, 2008),h 22.

permasalahan yang dianalisis sesuai hukum Islam yaitu faktor tidak terlaksananya eksekusi putusan Pengadilan harta bersama dan kendala –kendala yang ditemukan dalam menyelesaikan harta bersama tersebut.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan beberapa putusan dan wawancara yang peneliti lakukan Pengadilan Agama bersipat relatif dalam menetapkan harta bersama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tiga bentuk salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah dipaparkan di atas yaitu:

- 1 Salinan keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 319/Pdt.G/2009/PA Pbr yang menetapkan dan mengadili tentang harta bersama MUSTAFA KAMAL BIN H. MIMING (penggugat) dan HARVIYONES BINTI JOHAR (tergugat). Menetapkan harta bersama Pengugat dan tergugat adalah.
 - a. 1 (satu) unit bangunan rumah berlantai dua (lantai kedua seperdua dari bangunan) yang terletak di Jalan paus Gang H. Lima II No. 4, RT 03, RW 07, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.⁴
 - b. 1 unit sepeda Motor Kharisma Th 2005 No. Rangka MHIJD211X3K265898 No. Mesin JB21E-1263602 No. Pol BM 5626 Tj:
 - c. Dan beberapa peralatan rumah tangga seperti, TV, kulkas, Komputer, Tempat tidur dll.

⁴ Salinan Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 319/Pdt.G/2009/PA Pbr tanggal 7 April 2010.

2 Salinan Putusan Salinan keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 454/Pdt.G/2009/PA Pbr yang menetapkan dan mengadili tentang harta bersama RITA HARTATI,SH BINTI HALEL. RAMLI Bst (penggugat) dan Ir.EDWAR RUFLI,MT bin ZAINAL RUFLI. (tergugat). menetapkan harta bersama Pengugat dan tergugat adalah.

a. Sebidang tanah seluas 1.006, 50 m² dan sebuah rumah diatasnya dengan ukuran 20 x 15 m yang terletak di Jln. Merbau No 04 RT. 10 RW. 06 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran

- Sebelah Utara dengan tanah Sitompul ukuran 8m
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Padamulya ukuran 39m
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah T. Kamariah ukuran 38m
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan ukuran 11/39m

b. Satu unit rumah type 36/120 yang terletak di Griya Bina Widya Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Blok B. 62 dengan batas batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan rumah Maswan
- Sebelah Selatan dengan jalan buntu
- Sebelah Barat dengan jalan

- Sebelah Timur dengan tanah Abu Hanifah.⁵

3 Salinan Putusan Salinan keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 448/Pdt.G/2009/PA Pbr yang menetapkan dan mengadili tentang harta bersama YASRL BIN ILYAS SALIM (penggugat) dan INA binti M.DATOK BANDARO SUTAN. (tergugat). menetapkan harta bersama Pengugat dan tergugat adalah.

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanent bertingkat dua yang dibeli pada tahun 1986 yang terletak di jalan Puyuh Mas, Gg.Puyuh Mas VII No.9 RT 02 RW 11, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru
- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah petak kayu dua pintu yang dibeli pada tahun 1988, terletak di jalan Puyuh Mas Gg Puyuh Mas VII, kelurahan Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru.⁶

Tiga bentuk salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru diatas merupakan yang menjadi dasar peneliti dalam menyimpulkan bahwa pembagian harta bersama sejalan dengan prinsip-prinsip dan dasar dalam islam yaitu yang

⁵ Salinan Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 454/Pdt.G/2009/PA Pbr tanggal 28 November 2009.

⁶ Salinan Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 448/Pdt.G/2009/PA Pbr tanggal 28 Mei 2007.

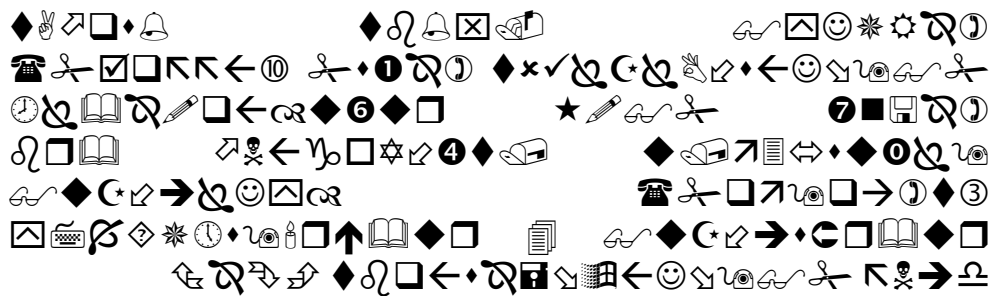
selalu mengedepankan azas keadilan dan berusaha menghindari terjadinya tindakan penganiayaan. Jika dilihat dari berbagai Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru diatas seyogianya bersipat fruktif dan relatif.

Oleh karena itu, hakim di pengadilan Agama Pekanbaru telah berupaya menetapkan sesuatu masalah tersebut berdasarkan dan ingin melakukan sesuai dengan porsinya. Dengan menetapkan harta bersama sesuai dengan hak nya masing-masing dengan tanpa mengabaikan hak yang harus diterima oleh kedua belah pihak antara mantan suami dan istri untuk mendapatkan hak nya sesuai dengan yang harus didapatinya.

Berdasarkan fakta di lapangan tentang Pelaksanaan Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, di temui beberapa kendala yaitu kendala yang dilatar belakangi tentang harta yang ingin diseleasikan itu banyak bermasalah. Pihak pihak Pengadilan Agama telah berusaha untuk menyelesaikan serta menerapkan hukum sesuai dengan putusannya, sehingga di harapkan dengan hukum yang telah ditetapkan itu bisa memberi menyelesaikan masalah yang di hadapi sehingga tidak mengabaikan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh mereka seperti pada masalah pembagian harta bersama tersebut

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan yang peneliti peroleh, bahwa permasalahan tersebut terlatak pada tidak adanya kerelaan kedua belah pihak yang bersengketa untuk melaksanakan putusan hakim, maka timbullah masalah yang mengakibatkan terjadinya permasalahan itu samapai saat sekarang tidak bisa tereksekusi.

Allah SWT telah memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Rosulullah Sebagai hakim dalam setiap urusan, dimana pada saat itu ia dapat mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Rosulullah, dan tentunya dapat menerima dengan sepenuh hati tanpa ada sedikitpun ganjalan atau ketidaksetujuan. Allah SWT telah menjelaskan pada ayat dibawah ini mengenai perkataan orang akan selalu bersda dalam koridor penerimaan sepenuhnya dan ketaatan yang sempurna terhadap apa yang telah diputuskan oleh Rosulullah SAW yaitu pada surat An-Nur Ayat 51 dan Surat Yasin ayat 6:



Artinya :

Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-nya agar rarul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan “kami Mendengar, dan kami patuh”. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung⁷

⁷ Departeman Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Semarang: Toha Putera, 1997)



Artinya :

Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai”.

Dari penjelasan ayat di atas maka dapat diambil sebuah garis bawah bahwa kita sebagai mukmin harus selalu mentaati Rosul dan perintah Allah SWT. Dalam Hukum Acara Peradilan Agama juga mempunyai sumber materiil yang diambil dari al-Qur'an maupun al-Hadits, jadi putusan dari seorang hakim yang tentunya juga merujuk pada pertimbangan hukum baik positif maupun hukum Islam (al-Quran dan al- Hadits) maka sebagai seorang mukmin hendaknya mengikuti putusan tersebut, dan tidak samapai mengingkarinya. Ketika mereka lalai dalam menjalankan perintah Allah maka dalam surat Yasin tadi dijelaskan agar mereka diberi peringatan menjalankan apa yang telah Allah perintah.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'I, bahwa Abu Syuraih menerangkan Rosulullah SAW bahwa kaumnya telah berselisih dalam suatu perkara, lalu mereka datang kepadanya dan diapun memutuskan perkara. Putusan itu diterima oleh kedua belah pihak, mendengar itu nabi pun berkata : alangkah baiknya. Rosulullah sendiri pernah menerima putusan Sa'ad Ibnu Mu'adz mengenai Bani Quraidhah dan memrintahkan untuk melaksanakannya.

Demikian juga pertengkaran antara Umar dengan Ubay Ibn Ka'ab tentang suatu kebun kurma, perkaranya ditahankan oleh Zaid Ibn Tsabit semua sahabat sepakat menerima putusan hakim dan membenarkan tahkim ini.⁸

Ini menunjukkan bahwasanya Islam membenarkan adanya lembaga tahkim ini di tinjau dari segi akal, dapat pula kita terima tahkim ini karena orang-orang yang menyerahkan perkaranya kepada hakim mempunyai wewenang terhadap dirinya sendiri. kepada pihak berperkara harus adanya kerelaan dan kedua belah pihak wajib melaksanakan hukum yang telah di putusan oleh hakim. Apabila keduanya telah mengungkapkan keterangan mereka masing-masing pada seseorang hakim, kemudian salah seorang ingin menarik lagi pentahkiman tersebut sebelum hakim memutuskan hukum, maka hakim itu dapat terus memutuskan hukum dan sah hukumnya.

Dalam Islam ditemukan, beberapa bentuk Pengadilan (*Qadhi*) yang bertindak tegas dalam menerapkan aturan syara' yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw, yaitu:

1) Qadhi

Qadhi biasa bertugas mengurus penyelesaian perkara sengketa di tengah masyarakat dalam hal mu'amalah (transaksi yang dilakukan antara satu orang yang lainnya) dan *uqubat* (sanksi hukum), misalnya perkara dalam ruang lingkup keluarga.

⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta : PT Al-Ma'arif Penerbit percetakan offset, 1964), h 69

2) Qadhi *Hisbah*

Qadhi Hisbah yaitu qadhi yang mengurus penyelesaian perkara penyimpangan yang bisa membahayakan hak jama'ah, misalnya pengurangan berat timbangan dalam jual beli Pasar.

3) Qadhi *Mazhalim*

adalah qadhi yang mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan Negara, misalnya kasus korupsi.⁹

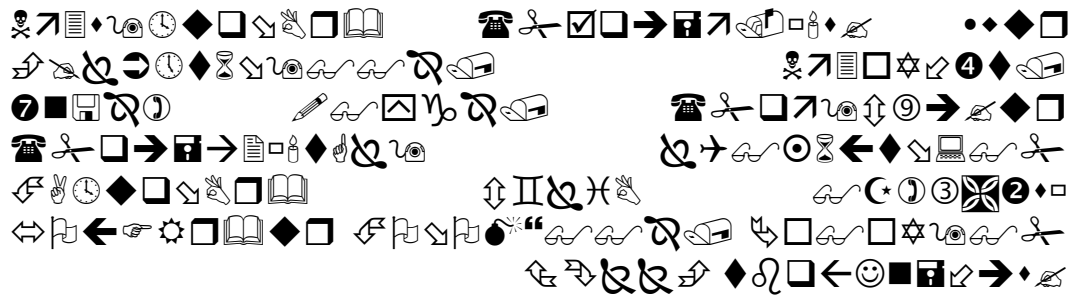
Dalam putusan ini sangat sulit untuk di eksekusi karena Setelah dilaksanakan survei ke lapangan pengadilan menemui kendala dalam pelaksanaan eksekusi yang mana harta yang ingin dieksekusi berada pada pengusutan pihak ketiga Dalam kasus ini pemohon belum mendapatkan hak nya yaitu sebidang tanah yang mana surat tanah masih berada dibank yang telah digadaikan oleh tergugat. Dalam hal ini pengadilan belum bisa melaksanakan eksekusi terhadap tanah tersebut karena surat tanah masih dalam pengusaan pihak bank.

Menurut keterangan yang didapat dari pihak pengadilan bahwa sesungguhnya pihak pengadilan sudah berusaha untuk menyelesaikan perkara tersebut dimana pihak pengadilan sudah melakukan survei di lapangan namun setelah dilakukan pengecekan kelapangan bahwa harta yang ada tersebut bermasalah karena tanah tersebut dalam gadaian Bank¹⁰.

⁹ Abdul Qadhim Zaltum, *Sistem Pemerintahan Islam* (Jakarta: Al-Izzah, 2000), h.229

¹⁰ Al-Masri (wakil Panitera), *wawancara*, Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 05 Januari 2011

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat Al – Baqarah ayat 188 yang berbunyi



Artinya;

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu (dengan jalan) dosa, pada hal kamu mengetahui.¹¹

Di dalam ungkapan ayat digunakan kata harta lain, hal ini merupakan peringatan bahwa umat itu satu di dalam menjalin kerja sama. Juga sebagai peringatan, bahwa menghormati harta orang lain itu berarti menghormati harta sendiri. Sewenang-wenang terhadap harta orang lain, berarti melakukan kejahatan kepada seluruh umat, karena salah seorang yang diperas merupakan salah satu anggota umat. Dan ia tentu akan terkena akibat negative lantaran seseorang yang memakan harta orang lain berarti memberikan dorongan kepada orang lain untuk berbuat hal yang serupa, dan terkadang menimpa dirinya jika keadaanya memang demikian, sehingga menjadi bomerang bagi dirinya¹²

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Semarang: Toha Putera, 1997), h. 122

¹² Ahmad Mustafa Al- Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, (Semarang; CV Toha Putra, 1987), h. 141,

Praktek *gono-gini* dikatakan *syirkah abdan* karena kenyataan bahwa sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka, kalau keadaan memungkinkan juga untuk meninggalkan kepada anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia. Suami isteri di Indonesia sama-sama bekerja mencari nafkah hidup. Hanya saja karena fisik isteri berbeda dengan fisik suami maka dalam pembagian pekerjaan disesuaikan dengan keadaan fisik mereka. Selanjutnya dikatakan *syirkah mufawadah* karena memang perkongsian suami isteri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau pemberian khusus untuk salah seorang diantara mereka berdua.¹³

Oleh Karena itu, dari sisi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan belum tereksekusi harta bersama yang terjadi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Pengadilan Agama sudah berupaya dan berferan aktif dalam menyelesaikan perkara tersebut hanya saja permasalahan tersebut belum menemui titik terangnya.

¹³. Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978) Cet. 11, h. 78-79

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan permasalahan yang merupakan sentral pembahasan skripsi ini diambil beberapa kesimpulan, adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bentuk pelaksanaan eksekusi pengadilan agama dalam pembangian harta bersama dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- a. **Peringatan (*aanmaning*)**

Apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pihak tergugat tidak mau melaksanakan apa yang dihukumkan kepadanya secara sukarela, terbuka hak penggugat untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan dan ketua pengadilan memberikan teguran untuk melaksanakan putusan tersebut.

Apabila pihak tergugat tidak mau memenuhi pembayaran yang dihukumkan kepadanya, sejak saat itu Ketua Pengadilan secara *exofficio* mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau jurusita untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat, sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam pasal 197 HIR atau pasal 208 RBG.

b. Sita Eksekusi (*executoriale beslag*)

Sita eksekusi atau *executoriale beslag* merupakan tahap lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi melaksanakan pembagian harta bersama dan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan atau juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
2. Dalam pelaksanaan putusan Pengadilan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara.

c. Penjualan Lelang (*executoriale verkoop*)

Jadi setelah sita eksekusi dilaksanakan, undang-undang memerintahkan penjualan barang sitaan. Cara penjualannya dengan perantaraan kantor lelang, dan penjualannya disebut penjualan lelang.

Dengan demikian, berdasarkan pasal 200 ayat (1) HIR, dalam pelaksanaan lelang, Ketua Pengadilan wajib meminta intervensi kantor lelang, dalam bentuk menjalankan penjualan barang sitaan dimaksud.

2. Kendala-kendala Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Harta Bersama, sebagai berikut :

1. Bercampurnya Dengan Harta Orang Lain

Masalah yang sering bermasalah ketika harta yang mau di eksekusi dilapangan adalah bahwa banyaknya harta bersama antara mantan suami dan mantan istri.

2. Adanya Pihak Ketiga.

Masalah lain yang sangat serius dalam masalah eksekusi yaitu ada harta yang di eksekusi berada di dalam pihak ketiga. Yaitu barang yang hendak di eksekusi tersebut tersebut masih dalam tahap pembayaran dan masih dalam pengawasan Bank, sehingga harta tersebut terkendala untuk di eksekusi dan menunggu kesepakatan kedua belah pihak mencari solusi terhadap masalah tersebut

3. Ketiadaan Kesepakatan Dalam Lelang.

Seperti pada kasus di atas dimana dalam permasalahan tersebut belum di temui kesepakatan tentang harga barang yang dimaksud, sehingga harta tersebut belum bisa dieksekusi. Hal ini menjadi kendala yang terjadi dilapangan yang di alami Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menjadi eksekusi terhadap kasus-kasus yang terjadi.

3. Analisis hukum Islam tentang kendala-kendala pembagian harta bersama

Mengenai masalah pembagian harta bersama hendaklah diselesaikan sesuai dengan hak-haknya masing-masing. Harta bersama tersebut hendaklah dibagi sesuai dengan porsinya yang telah ditetapkan. Dan merupakan suatu kewajiban bagi mantan suami serta istri untuk menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut guna untuk menghindari komplik dikemudian hari.

Adapun mengenai masalah masalah harta bersama yang bermasalah hendak kedua belah pihak berusaha untuk mengedepankan kemufakatan dalam penyelesaian tentang harta tersebut.

Serta menyelesaikan masalah-masalah terhadap harta yang yang bermasalah sehingga tidak menemui kendala dalam pembagiannya dengan demikian harta tersebut bisa di bagikan sesuai dengan hak-hak nya masing diantara kedua belah pihak tersebut.

Terhadap mantan suami yang yang sengaja memperlambat tentang penyelesaian harta bersama hendaklah menyelesaikan serta memberikan hak kepada mantan istri sesuai dengan hak yang di perolehnya. Hendaklah tidak mempersulit serta melalaikannya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang ingin disampaikan peneliti, yaitu :

1. Pihak Pengadilan Agama

Dalam hal ini, pihak Pengadilan Agama Pekanbaru khususnya, mengembalikan fungsi pengadilan sesuai fitranya (Islam) bertindak tegas dan cepat dalam mengadili setiap kasus yang ada di tengah masyarakat. Pengadilan Agama Pekanbaru harus bersifat pro aktif dan mencari solusi yang paling baik dalam masalah tidak terlaksananya eksekusi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pembagian harta bersama.

2. Para Pembaca

Diharapkan bagi para pembaca untuk bisa melanjutkan penelitian berikutnya agar dapat meneliti secara mendalam tentang pembagian harta bersama untuk mencari kesempurnaan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama pada pasangan sumai istri yang bermasalah dalam pembagian harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1995), Cet. Ke I
- A Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), Cet. Ke XIII
- Depertemen Agama RI, *Al-Quranul Karim*, (Jakarta : Syamil Cipta Media, 2005).
- , *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Dirjen Binbaga Islam, 1991)
- Fauzan M. MM, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2000), Cet. Ke III
- Hasan Syaik Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2006), Cet II
- Hasan Cik Bisri, MS, *Peradilan Agama I Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), Cet. III.
- , *Peradilan Agama I Indonesia*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000), Cet.III
- Muhtar Kamal, *Asas Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), Cet II.
- Rasjid Sulaiman H, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), Cet.XXXX.
- Hasan Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), Cet XII
- M. Yahya Harahap, *Rung Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- , *Hukum Acara Perdata Permasalahan Dan Penetapan Sita Jaminan*, Gramedia, Jakarta , 1987
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan kompilasi Hukum Islalm di Indonesia serta penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), Cet I.

UU. Nomor 14 / 1970, *Tenang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaiman Prosedur pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Berapa Banyak perkara harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru selama 2008-2010?
3. Berapa banyak yang melapor tidak terlaksana putusan hakim Kepada Pengadilan Agama Pekanbaru?
4. Bagaimana Prosedur pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Pekanbaru?
5. Apa respon Pengadilan Agama Terhadap laporan tentang pembagian harta bersama yang tidak terlaksana?
6. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Pekanbaru?